



Integrasi Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Gizi dalam Program MBG: Perspektif Pembangunan Sosial

Anif Muchlashin

Prodi Pembangunan Sosial, Universitas Mulawarman, Jl. Gunung Kelua, Samarinda, 75119, Kalimantan Timur
e-mail: anifmuchlashin@fisip.unmul.ac.id

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara pemberdayaan UMKM dan peningkatan gizi dalam implementasi Program MBG dari perspektif pembangunan sosial, dengan ruang lingkup pada aspek kebijakan, pelaksanaan, dan keterlibatan aktor lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur serta analisis data sekunder yang bersumber dari media massa dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara aspek gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh pendekatan kebijakan yang masih bersifat sektoral, penggunaan makanan matang yang berisiko terhadap kualitas gizi, keterbatasan pemanfaatan bahan pangan lokal, serta belum maksimalnya pelibatan UMKM dalam rantai penyediaan. Selain itu, ditemukan pula kendala pada aspek efisiensi pembiayaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan penguatan kebijakan yang lebih integratif dan kolaboratif, dengan menempatkan UMKM sebagai aktor utama serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program MBG.

Kata Kunci: MBG; UMKM; Gizi; Pembangunan Sosial

How to Cite: Muchlashin, A. (2026). Integrasi Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Gizi dalam Program MBG: Perspektif Pembangunan Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 20(1), 16-23.

Copyright © 2026 (Anif Muchlashin)

Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh. Salah satu indikator utama kualitas SDM adalah status gizi masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita. Gizi yang baik memiliki korelasi kuat dengan tingkat kesehatan, kemampuan belajar, produktivitas, hingga daya saing bangsa dalam jangka panjang. Namun demikian, persoalan gizi di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam agenda pembangunan. Data empiris menunjukkan bahwa permasalahan stunting, gizi buruk, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi masih menjadi isu serius di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah tertinggal. Studi dalam *Medical Journal* menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada kisaran 21,6% pada balita, disertai dengan masalah gizi lain seperti wasting (7,7%) dan underweight (17,1%), yang mencerminkan tingginya beban malnutrisi pada kelompok rentan (Mardhotillah, 2025). Selain itu, penelitian dalam (Mumtaza & Mumtaza, 2024) menegaskan bahwa keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan kondisi ketahanan pangan rumah tangga menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di Indonesia.

Sebagai bentuk intervensi strategis, pemerintah Indonesia meluncurkan Program MBG yang mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas SDM. Lebih dari sekadar



program bantuan pangan, MBG dirancang sebagai kebijakan lintas sektor yang juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan lokal serta pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok penyediaan makanan, kalau lihat dari *best practice* Indonesia punya daerah yang terintegrasi dalam penyelesaiannya (Muchlashin, 2025).

Program MBG menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Selain persoalan klasik seperti ketimpangan akses dan keterbatasan infrastruktur, muncul pula sejumlah isu baru yang berpotensi menghambat efektivitas program. Pertama, model penyediaan makanan matang (*ready-to-eat*) dalam program MBG menimbulkan tantangan tersendiri. Sistem ini membutuhkan standar tinggi dalam hal higienitas, distribusi, dan ketepatan waktu. Dalam praktiknya, terdapat risiko penurunan kualitas makanan akibat proses distribusi yang panjang, serta potensi pemborosan apabila makanan tidak dikonsumsi secara optimal. Selain itu, pendekatan ini cenderung kurang memberdayakan masyarakat secara langsung dibandingkan dengan model berbasis bahan mentah yang dapat diolah oleh komunitas lokal.

Kedua, penggunaan bahan pangan yang tidak sepenuhnya berbasis lokal menjadi persoalan penting. Dalam beberapa kasus, penyediaan bahan pangan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga mengurangi peluang bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk terlibat secara maksimal. Kondisi ini berpotensi melemahkan tujuan awal program sebagai penggerak ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan biaya logistik dan ketergantungan terhadap rantai pasok eksternal.

Ketiga, terdapat isu terkait efisiensi dan transparansi pembiayaan program, termasuk alokasi anggaran operasional yang dalam beberapa kasus mencapai kisaran \pm Rp6 juta per unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Besaran anggaran ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas penggunaan dana, terutama jika tidak diimbangi dengan kualitas layanan yang optimal serta dampak yang signifikan terhadap perbaikan gizi masyarakat. Selain itu, pengelolaan anggaran yang besar juga berisiko menimbulkan inefisiensi maupun potensi penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.

Keempat, keterbatasan kapasitas UMKM lokal dalam memenuhi standar program juga menjadi kendala. Tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk memenuhi standar produksi makanan dalam jumlah besar dengan kualitas dan keamanan pangan yang terjamin. Hal ini menyebabkan keterlibatan UMKM masih bersifat terbatas dan belum merata.

Kelima, tantangan koordinasi antar lembaga dan pelaksana di tingkat lokal juga mempengaruhi implementasi program. MBG sebagai program lintas sektor membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta aktor non-pemerintah. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini belum sepenuhnya optimal, sehingga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Program MBG menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Pertama, masih tingginya angka masalah gizi menunjukkan bahwa intervensi yang ada belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran secara efektif. Kedua, terdapat ketimpangan akses terhadap pangan bergizi antar wilayah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur distribusi dan logistik. Ketiga, kesiapan kelembagaan pelaksana seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum merata, sehingga berdampak pada kualitas dan keberlanjutan program. Keempat, isu keamanan dan kualitas pangan juga menjadi perhatian, mengingat adanya potensi risiko dalam proses produksi dan distribusi makanan. Kelima, meskipun regulasi membuka peluang keterlibatan UMKM, dalam praktiknya partisipasi UMKM masih belum optimal akibat keterbatasan kapasitas produksi, standar mutu, serta akses terhadap sistem pengadaan dan distribusi.

Secara normatif, pelaksanaan Program MBG telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Program Makan Bergizi Gratis. Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya tata kelola program yang terintegrasi, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk UMKM, koperasi, dan badan usaha lokal. Dalam kerangka kebijakan tersebut,



UMKM tidak hanya diposisikan sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal dan keberlanjutan program.

Terdapat kesenjangan (*research gap*) yang menunjukkan bahwa integrasi antara aspek peningkatan gizi dan pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dalam Program MBG belum sepenuhnya optimal, baik dalam praktik maupun dalam kajian akademik. Secara empiris, berbagai laporan menunjukkan bahwa program intervensi gizi di Indonesia masih cenderung berorientasi pada aspek konsumsi dan bantuan pangan. Data (Kemenkes, 2023) menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih berada pada angka 21,6%, meskipun telah mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis bantuan belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah gizi yang bersifat struktural.

Di sisi lain, peran UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal juga sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa UMKM di sektor pangan masih menghadapi keterbatasan dalam akses pasar, teknologi, dan integrasi dengan program pemerintah, termasuk program berbasis gizi (Tambunan, 2022).

Lebih lanjut, laporan dari (World Bank, 2020) menegaskan bahwa program perlindungan sosial dan intervensi gizi di negara berkembang cenderung berjalan secara sektoral, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum maksimal. Hal ini diperkuat oleh studi (Food and Agriculture Organization, 2019) yang menyatakan bahwa pendekatan ketahanan pangan yang efektif seharusnya mengintegrasikan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas.

Selain itu, kajian akademik yang ada masih cenderung membahas isu gizi dan UMKM secara terpisah. Penelitian tentang gizi umumnya berfokus pada intervensi kesehatan masyarakat seperti suplementasi dan edukasi (Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, 2013) sementara studi tentang UMKM lebih menitikberatkan pada aspek kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi tanpa mengaitkannya secara langsung dengan isu gizi masyarakat (Tambunan, 2022). Akibatnya, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji sinergi antara keduanya dalam satu kerangka kebijakan terpadu.

Evaluasi program juga masih didominasi oleh indikator output, seperti jumlah penerima manfaat dan distribusi bantuan. Padahal, menurut pendekatan *Social Return on Investment* (SROI), keberhasilan program seharusnya juga diukur dari dampak sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan penguatan kapasitas komunitas (Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzert, E., & Goodspeed, 2012). Namun, penerapan evaluasi berbasis dampak ini masih terbatas dalam konteks program gizi di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini hadir untuk menjawab *gap research* melalui penelitian ini.

Dalam perspektif pembangunan sosial, integrasi antara pemberdayaan UMKM dan peningkatan gizi dalam Program MBG merupakan pendekatan yang strategis dan relevan. Pembangunan sosial menekankan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan institusional. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, dengan mendorong partisipasi aktif, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas lokal. Dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok MBG, program ini berpotensi menciptakan efek ganda (*multiplier effect*), yaitu peningkatan status gizi masyarakat sekaligus penguatan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan sosial yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Patel, 2015).

Penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana integrasi pemberdayaan UMKM dan peningkatan gizi dalam Program MBG dapat dioptimalkan dalam kerangka pembangunan sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih



holistik, tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat serta penciptaan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, begitu tujuan dari proses pembangunan sosial.

Pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan manusia secara menyeluruh melalui integrasi kebijakan ekonomi dan sosial. Berbeda dengan paradigma pembangunan konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, pembangunan sosial memandang bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga oleh akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi. Menurut (Midgley, 2014) pembangunan sosial adalah proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara simultan dengan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi negara dalam menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Konteks kebijakan pembangunan sosial juga mengedepankan integrasi antara program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Artinya, intervensi sosial tidak hanya bersifat karitatif atau bantuan semata, tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, program seperti MBG dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial, karena tidak hanya bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi lokal melalui melibatkan berbagai aktor, termasuk UMKM. Dengan demikian, pembangunan sosial menjadi kerangka analisis yang relevan untuk melihat sejauh mana program MBG mampu memberikan dampak yang bersifat multidimensional, baik pada aspek kesehatan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial secara umum.

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu berperan secara optimal dalam perekonomian. Dalam perspektif pembangunan, UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal, penyerap tenaga kerja, serta instrumen pengurangan kemiskinan. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan proses yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, memperoleh akses terhadap sumber daya, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, pemberdayaan juga mencakup penguatan kemampuan individu dan kelompok dalam aspek psikologis, sosial, dan kelembagaan sehingga mampu mandiri dan berdaya dalam mengelola kehidupan serta lingkungannya (Laila & License, 2025; Syamsi & Lalla, 2024).

Dalam konteks kebijakan publik, pemberdayaan UMKM tidak hanya sebatas pada pemberian bantuan modal, tetapi juga mencakup peningkatan keterampilan, akses terhadap pasar, serta integrasi dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan Program MBG, pemberdayaan UMKM dapat diwujudkan melalui melibatkan aktif dalam rantai pasok penyediaan pangan, baik sebagai produsen bahan baku maupun penyedia jasa pengolahan makanan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan UMKM seringkali masih terbatas akibat kendala kapasitas produksi, standar mutu, dan akses terhadap sistem pengadaan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan menjadi penting untuk memastikan bahwa UMKM tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi aktor utama dalam mendukung keberhasilan program sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Ketahanan pangan dan gizi merupakan konsep yang menekankan pada terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh individu. Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, serta dapat diakses secara fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan aktif (Suryana, 2014; Purwaningsih, 2008). Konsep ini mencakup empat dimensi utama, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Sementara itu, aspek gizi menekankan pada kualitas konsumsi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara optimal.



Dalam implementasi program pangan, termasuk Program MBG, aspek ketahanan pangan dan gizi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut kualitas, keamanan, serta keberlanjutan distribusi pangan. Model penyediaan makanan matang (*ready-to-eat*) dalam MBG, misalnya, menuntut adanya standar tinggi dalam hal higienitas dan keamanan pangan, karena berisiko mengalami penurunan kualitas selama proses distribusi. Selain itu, penggunaan bahan pangan yang tidak berbasis lokal juga dapat memengaruhi dimensi ketersediaan dan keberlanjutan pangan. Oleh karena itu, pendekatan ketahanan pangan dan gizi menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana program MBG mampu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat secara efektif sekaligus mendukung sistem pangan lokal yang berkelanjutan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi literatur (*library research*) yang dipadukan dengan analisis media untuk memahami integrasi pemberdayaan UMKM dan peningkatan gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Subjek penelitian dalam studi ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen ilmiah, media massa, dan konten media sosial yang relevan dengan topik penelitian. Literatur ilmiah diperoleh dari buku dan jurnal yang membahas pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta ketahanan pangan dan gizi. Data media massa dikumpulkan dari portal berita nasional kredibel, sedangkan data media sosial diperoleh dari platform digital seperti Twitter (X), Instagram, dan TikTok untuk menangkap persepsi publik.

Instrumen penelitian berupa pedoman dokumentasi dan lembar kategorisasi data yang disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi aspek pemberdayaan UMKM, pemenuhan gizi, serta keterkaitannya dalam perspektif pembangunan sosial.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui: (1) penelusuran literatur ilmiah; (2) pengumpulan berita dari media massa; (3) observasi non-partisipatif pada media sosial; dan (4) dokumentasi serta klasifikasi data sesuai kategori analisis.

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Pendekatan ini menekankan proses analisis yang sistematis melalui pengorganisasian dan interpretasi data untuk menemukan pola dan makna.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis data yang diperoleh, yang merupakan salah satu cara umum untuk meningkatkan kredibilitas dalam penelitian kualitatif.

Hasil

Analisis terhadap berbagai sumber literatur, pemberitaan media seperti Kompas dan Tempo, serta diskursus publik di Twitter (X) dan TikTok menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan sejumlah kontradiksi antara tujuan normatif kebijakan dan realitas operasional di lapangan.

Pertama, meskipun MBG diklaim sebagai intervensi strategis dalam peningkatan gizi, temuan menunjukkan bahwa model distribusi makanan matang (*ready-to-eat*) justru menghadirkan persoalan baru terkait kualitas, higienitas, dan ketepatan distribusi. Variasi kualitas makanan antar wilayah serta munculnya kritik publik terhadap standar penyajian mengindikasikan lemahnya kontrol mutu dan belum terbangunnya sistem pengawasan yang konsisten. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pendekatan yang digunakan dalam menjamin pemenuhan gizi yang berkualitas.

Kedua, dalam aspek pemberdayaan ekonomi, keterlibatan UMKM dalam program MBG cenderung bersifat simbolik daripada substantif. Meskipun secara kebijakan UMKM disebut sebagai bagian dari rantai pasok, dalam praktiknya akses UMKM terhadap program masih terbatas. Hambatan



berupa standar produksi, skala ekonomi, serta mekanisme pengadaan yang cenderung tidak inklusif menyebabkan dominasi aktor yang lebih besar dan terorganisir. Dengan demikian, program ini belum mampu menciptakan redistribusi peluang ekonomi secara adil.

Ketiga, orientasi program yang belum berbasis pada potensi lokal tercermin dari masih terbatasnya penggunaan bahan pangan lokal. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah menunjukkan adanya disfungsi dalam desain program yang seharusnya mengintegrasikan penguatan ekonomi lokal. Kondisi ini tidak hanya mengurangi potensi multiplier effect, tetapi juga berpotensi menciptakan ketergantungan baru dalam sistem distribusi pangan.

Keempat, isu efisiensi dan akuntabilitas anggaran menjadi sorotan penting. Besaran alokasi biaya operasional per unit layanan (SPPG) yang relatif tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang signifikan. Hal ini memperlihatkan adanya indikasi inefisiensi dalam tata kelola program, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Program MBG mengalami apa yang dalam literatur kebijakan publik disebut sebagai implementation gap, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan yang ideal dan realitas implementasi di lapangan. Secara konseptual, MBG dirancang sebagai program integratif yang menggabungkan aspek pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, program ini lebih menyerupai intervensi sektoral yang terfragmentasi, dengan dominasi pendekatan bantuan sosial dibandingkan pemberdayaan.

Dari perspektif pembangunan sosial (Midgley, 2014), kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam mengintegrasikan dimensi kesejahteraan dan produktivitas secara simultan. Program yang seharusnya mampu menciptakan sinergi antara peningkatan kualitas hidup dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat justru berjalan secara parsial. Akibatnya, MBG berisiko terjebak dalam pola kebijakan yang bersifat karitatif dan jangka pendek, tanpa memberikan dampak struktural yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, rendahnya keterlibatan UMKM menunjukkan bahwa prinsip pemberdayaan belum terimplementasi secara optimal dalam program. Kajian dalam (Saha et al., 2022) menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya membuka peluang partisipasi, tetapi harus diikuti dengan penguatan kapasitas, akses terhadap pembiayaan, serta integrasi dalam rantai nilai. Tanpa intervensi yang sistematis, UMKM cenderung tetap berada pada posisi marginal dalam sistem ekonomi. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), absennya strategi yang secara konkret memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM menunjukkan bahwa program ini belum mampu mentransformasikan UMKM menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi lokal.

Dalam perspektif ketahanan pangan, penggunaan model makanan matang yang terpusat juga perlu dikritisi. Studi dalam (Manlio Del Giudice P, 2016), menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga mencakup kualitas gizi, keamanan pangan, serta keberlanjutan sistem distribusi. Model distribusi makanan siap saji dalam skala besar berpotensi menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas nutrisi dan keamanan pangan, terutama jika tidak didukung oleh sistem logistik dan pengawasan yang memadai. Selain itu, pendekatan yang terpusat cenderung mengurangi fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan gizi berbasis lokal serta berpotensi melemahkan peran sistem pangan lokal. Pendekatan ini berisiko tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, minimnya pemanfaatan bahan pangan lokal menunjukkan lemahnya orientasi pembangunan ekonomi lokal dalam desain program. Padahal, dalam kerangka pembangunan sosial, pemanfaatan sumber daya lokal merupakan strategi kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketergantungan pada pasokan eksternal tidak hanya mengurangi efisiensi, tetapi juga menghambat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat ditentukan oleh



kemampuannya untuk keluar dari pendekatan sektoral menuju pendekatan integratif yang berbasis pembangunan sosial. Tanpa adanya reorientasi kebijakan yang menempatkan pemberdayaan UMKM dan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai komponen utama, program ini berpotensi gagal mencapai tujuan jangka panjangnya, yaitu peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan dan penguatan kesejahteraan masyarakat secara struktural.

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang memiliki tujuan ganda, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui melibatkan UMKM. Dalam perspektif pembangunan sosial, program ini seharusnya menjadi instrumen intervensi yang holistik karena mengintegrasikan dimensi kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum berjalan secara optimal, karena implementasi program masih cenderung bersifat sektoral dengan fokus utama pada pemenuhan gizi, sementara aspek pemberdayaan UMKM belum terintegrasi secara sistematis. Berbagai permasalahan turut memperkuat kondisi tersebut, antara lain penggunaan model makanan matang yang berisiko terhadap kualitas dan keamanan pangan, keterbatasan pemanfaatan bahan pangan lokal, serta ketergantungan pada rantai pasok non-lokal yang mengurangi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Selain itu, keterlibatan UMKM masih terbatas akibat kendala kapasitas produksi, standar mutu, dan akses terhadap sistem pengadaan, disertai isu efisiensi pembiayaan serta lemahnya koordinasi antar pelaksana program. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program MBG belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembangunan sosial yang menekankan pada integrasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan, sehingga tanpa perbaikan dalam desain dan implementasi kebijakan, potensi program sebagai instrumen pembangunan dengan dampak ganda (gizi dan ekonomi) belum dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, diperlukan penguatan integrasi kebijakan yang secara eksplisit memasukkan strategi pemberdayaan UMKM, optimalisasi peran UMKM melalui kebijakan afirmatif seperti pelatihan, akses permodalan, dan kemudahan pengadaan, peningkatan pemanfaatan bahan pangan lokal, evaluasi model penyediaan makanan agar lebih adaptif dan partisipatif, penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran, peningkatan koordinasi kelembagaan antar pemangku kepentingan, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis dampak guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih bagi Fisip Universitas Mulawarman karena telah mendukung dalam penelitian ini.

Referensi

- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477.
- Food and Agriculture Organization. (2019). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. FAO.
- Indonesia, K. K. R. (n.d.). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022* (Vol. 2023). Kemenkes RI.
- Laila, A. N., & License, C. C. (2025). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Social Capital as a Catalyst for Community Empowerment : Evidence from KWT Srikandi Mrican , Indonesia Social Capital as a Catalyst for Community Empowerment : Evidence from KWT Srikandi Mrican , Indonesia*. <https://doi.org/10.14421/jpm.2025.091-02>
- Manlio Del Giudice P, P. A. (2016). Strategic orientation and information technological turbulence: Contingency perspective in SMEs. *Business Process Management Journal*, 22(2), 368–382.
- Mardhotillah, H. (2025). *Kajian Literature : Peran Ketahanan Pangan Dalam Mencegah Stunting pada Anak di Indonesia Literature Review : The Role of Food Security in Preventing Stunting in Children*



in Indonesia. 1(3).

- Midgley, J. (2014). *Social Development*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446294987>
- Muchlashin, A. (2025). Penurunan Stunting Berbasis Komunitas Studi Kasus Percontohan Kalurahan Sidoluhur Kabupaten Sleman. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 339–351.
- Mumtaza, M., & Mumtaza, M. (2024). Hubungan Ketahanan Pangan dan Keragaman Pangan dengan Kejadian Stunting Balita Usia 24-59 Bulan *The Relationship between Food Security and Dietary Diversity with Stunting Incidence Under-five Aged 24-59 Months*. 93–101.
- Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzert, E., & Goodspeed, T. (2012). *A Guide to Social Return on Investment*. The SROI Network.
- Patel, L. (2015). Social welfare and social development in South Africa. *Social Development Issues*, 37(1), 1–15.
- Saha, P. E. U., Ecil, M. I. K., Enengah, D. A. N. M., Eningkatkan, U. M., & Asyarakat, K. E. M. (2022). *P u m k m (umkm) m k m . 1*.
- Syamsi, N., & Lalla, N. (2024). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia (JPMEI) Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. 1, 9–14*.
- Tambunan, T. T. H. (2022). Recent Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Management Review*, 06(01), 193–214. <https://doi.org/10.37602/ijssmr.2022.6112>
- World Bank. (2020). *Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery*. World Bank.